



LAKIP (LKjIP)



2017



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-NYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2107. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2107. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Mataram, 9 Februari 2018

KEPALA BADAN KESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. Lalu Syafi'i, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198203 1 440

RINGKASAN EKSEKUTIF/ *EXECUTIVE SUMMARY*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam kurung waktu 5 tahun (2013-2018) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan pencapaian sebagian besar target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penurunan jumlah konflik sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik adalah dua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang juga menjadi Indikator RPJMD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang cukup menonjol pencapaiannya. Jumlah konflik sosial ditahun 2017 sebanyak 21 kasus jauh lebih kecil dari jumlah konflik sosial yang ditargetkan yaitu 31 kasus. Begitu pula dengan Partisipasi Masyarakat dalam Politik juga mengalami peningkatan dari 71% yang ditargetkan dapat terlampaui menjadi 73,43% pada pemilu serentak di 5 Kab/Kota pada tahun 2015.

Keberhasilan dalam mencapai target dari kedua indikator kinerja ini tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target dari program lainnya seperti jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan, paham radikalisme, pemberantasan penyakit masyarakat, dan jumlah orpol/ormas yang terbina. Sebanyak Rp. 35.705.699.520 total anggaran yang digunakan dalam kurung waktu 5 tahun (2013-2018) dalam rangka mewujudkan masyarakat NTB yang aman dan tentram. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dalam perbedaan baik yang dilatarbelakangi dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagai tujuan dari kegiatan-kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam lima tahun terakhir menjadikan masyarakat NTB makin dewasa dalam menanggapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kesadaran bernegara masyarakat NTB tidak hanya terhenti pada menjalin kerukunan dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah, namun juga terpatri pada kesadaran dalam partisipasi politik.

Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, dan tentram sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan lainnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai persoalan dan permasalahan dihadapi pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri baik dari segi anggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Ketidakkonsistenan penganggaran yaitu beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra 2013-2018 tidak mendapatkan dukungan anggaran pada tahun anggaran adalah salah satu dari permasalahan dalam segi penganggaran. Sedangkan permasalahan dari segi teknis adalah masih lemahnya sinergitas antara Bakesbangpoldagri dengan mitra kerja yaitu FKDM, FKPT, FKUB dsb.

Terlepas dari permasalahan tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Provinsi NTB cukup memberikan makna bagi peningkatan kondusifitas daerah dalam kurung waktu lima tahun. Meskipun secara administratif Bakesbangpoldagri Provinsi NTB belum mendapatkan penghargaan, namun Pemerintah Pusat telah menjadikan NTB sebagai lokasi dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, seperti Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pertemuan Nasional Penanggulangan Terorisme dsb.

Dengan memahami peluang, potensi dan keunggulan yang dimiliki berdasarkan pengalaman selama ini, maka target-target kinerja Bakesbangpoldagri pada akhir periode 2013-2018 yaitu pada tahun 2018 cukup optimis dapat dicapai meskipun pada tahun ini adalah tahun politik yaitu penyelenggaraan serentak tahun 2018. Di tahun ini pula dibutuhkan energi yang besar untuk mewujudkan target Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik sebagai salah satu dari 31 Indikator Utama Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB.

Mataram, 9 Februari 2018

KEPALA BADAN KESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. Lalu Syafi'i, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198203 1 440

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Struktur, Tugas Dan Fungsi Organisasi	6
C. Kendala Pelaksanaan Tugas	8
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	24
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis PD	
2. Indikator Kinerja Utama PD	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	
5. Rencana Aksi Tahun 2018	
6. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja PD (2017)	
7. Laporan Pendukung LAKIP 2017	
8. Data Konflik Tahun 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

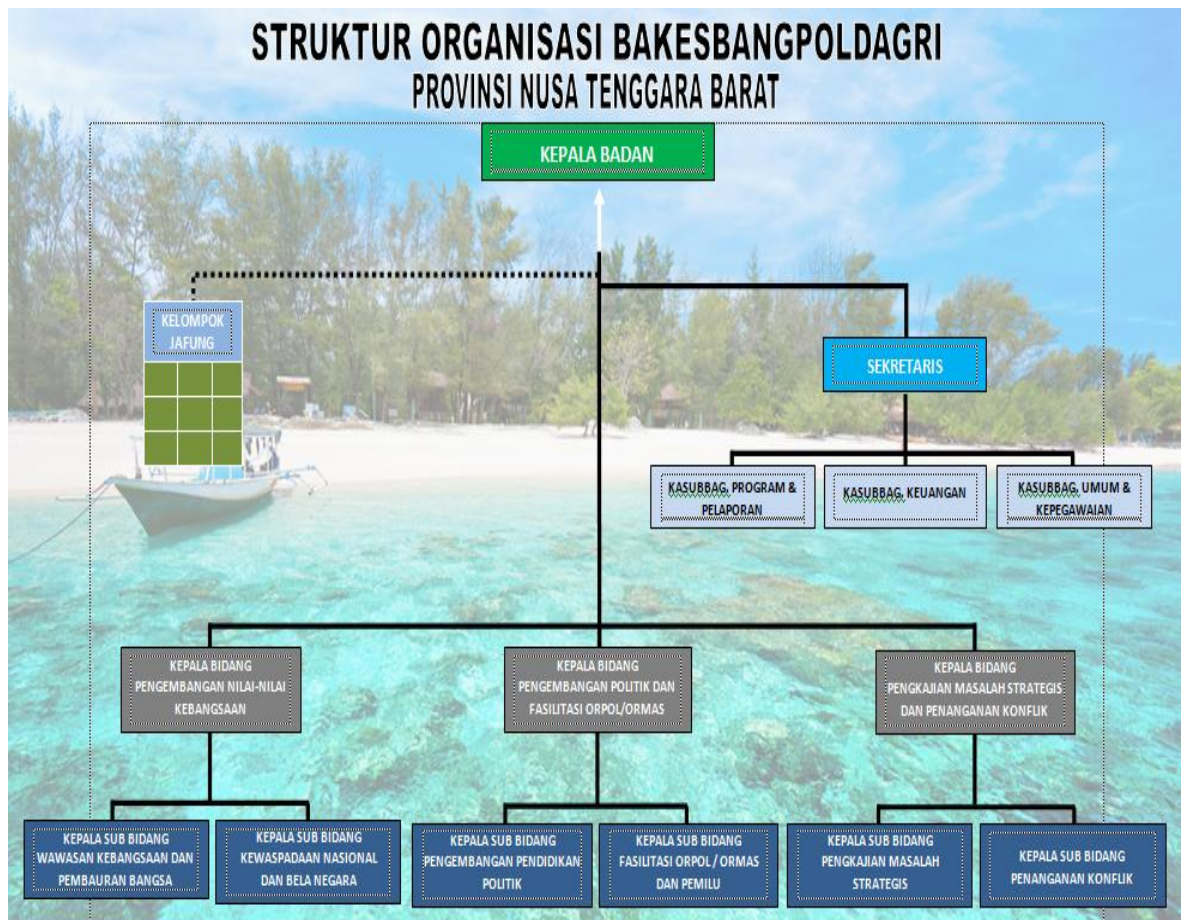
Salah satu alat untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*) adalah tersedianya alat sebagai satu kesatuan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan akuntabel. Salah satu alat tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat tentang capaian-capaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi pemerintah. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Permenpan No. 29 Tahun 2010.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terciptanya kondisi daerah yang aman, tentram, harmonis, dan damai merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Bagaimana kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2017 dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis maupun RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018? Berikut akan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Untuk menunjang Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam kegiatan pembangunan maka penataan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, dengan struktur organisasi sbb:

1. Kepala Badan (Eselon II/a)
2. Sekretaris (Eselon III/a)
 - a. Kasub Program & Pelaporan (Eselon IV/a)
 - b. Kasubag Keuangan (Eselon IV/a)
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV/a)
9. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan (Eselon III/a)
 - a. Kasubid Wasbang & Pembauran Bangsa (Eselon IV/a)
 - b. Kasubid Kewaspadaan Nasionan & Bela Negara (Eselon IV/a)
4. Kabid Pengembangan Politik & Fasilitasi Orpol/Ormas (Eselon III/a)
 - a. Kasubid Pengemb Pendidikan Politik (Eselon IV/a)
 - b. Kasubid Fas Orpol/Ormas dan Pemilu (Eselon IV/a)
5. Kabid PMS dan PK (Eselon III/a)
 - a. Kasubid PMS (Eselon IV/a)
 - b. Kasubid PK (Eselon IV/a)



Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Pemberian dukungan atas urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kendala Pelaksanaan Tugas

Meskipun sebagian besar dari target indikator kinerja dapat dicapai, namun tidak berarti lepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Kendala yang cukup dirasakan adalah masih minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bakesbangpoldagri Provinsi NTB baik dari secara kuantitas maupun kualitas. Aparat yang telah mengikuti latihan keintelejenan misalnya, hanya satu orang saja sangat kewalahan disaat kondisi masyarakat yang sangat dinamis seperti sekarang ini.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukkan pencapaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performanceresult*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performanceplan*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LKjIP tahun 2017 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan penekanan pada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dalam kurun waktu Tahun 2017 ini.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk Tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menjelaskan capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- C. BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB serta langkah di masa mendatang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisiko rendah dan citra yang ingin diwujudkan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, sebagai berikut;

Visi dan Misi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB

**TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT NTB YANG KONDUSIF,
TOLERAN DAN TERTIB**

Untuk memenuhi visi tersebut, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB menjabarkannya ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan sumber daya dalam rangka mendukung kinerja SKPD;
2. Meningkatkan keterpaduan pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pengembangan kehidupan berpolitik;
4. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari :

- a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sarana dan prasarana serta

personil, dengan **sasaran** sebagai berikut : (Kasubag Umum &Kepegawaian)

1) Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran secara manajerial;

2) Terwujudnya pengelolaan personil/aparat secara manajerial.

b. Meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan, **sasaran** sebagai berikut : (Kasubag Keuangan)

1) Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel;

2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, dengan **sasaran** sebagai berikut : (Kasubag Program)

1) Terwujudnya program dan kegiatan yang sinergis, koordinatif, dan responsif;

2) Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel.

d. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat, dengan **sasaran** sebagai berikut; (Kasubid Wawasan Kebangsaan & Pembauran Bangsa Bidang PNNK)

1) Terwujudnya masyarakat yang tertib

2) Terwujudnya dialog antar umat dan golongan

e. Meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam bela negara, dengan **sasaran** sebagai berikut : (Kasubid Kewaspadaan Nasional & Bela Negara Bid. PNNK)

1) Terwujudnya pembinaan dan pelatihan bela Negara

2) Terwujudnya kehidupan masyarakat berlandaskan empat pilar kebangsaan (Pancasila, Binneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI)

f. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dengan **sasaran** sebagai berikut: (Kasubid Pengembangan Pendidikan Politikl Bid. Pengembangan Politik dan Fasilitas Orpol/Ormas)

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik

2. Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang

aspiratif

g. Meningkatkan efektifitas fasilitasi ormas/ orpol dan pemilu, dengan **sasaran** sebagai berikut: (Kasubid Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu Bid. Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas)

- 1) Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi terhadap parpol /ormas masyarakat
- 2) Terwujudnya pembinaan masyarakat tentang pemilu

h. Meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, dengan **sasaran** sebagai berikut: (Kasubid Pengkajian Masalah Strategis Bid. PMS & PK)

- 1) Terwujudnya aturan hukum yang efektif
- 2) Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba.

i. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan, dengan **sasaran** sebagai berikut: (Kasubid Penanganan Konflik Bid PMS & PK)

- 1) Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat
- 2) Berkurangnya konflik sosial

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib	Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan
2.	Berkurangnya konflik sosial	Penurunan jumlah konflik sosial
3.	Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat	Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik
5.	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat
6.	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Jumlah Ormas yang terbina

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, PK dalam arti luas adalah merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib	Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan	5000 Orang
2.	Berkurangnya konflik social	Penurunan jumlah konflik sosial	32 Kasus
3.	Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat	Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme	5000 Orang
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik	72,50 %
5.	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat	20 Kelompok Masyarakat (Pokmas)
6.	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Jumlah Ormas yang terbina	100 Ormas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1. Rincian tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib	Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan	5000 Orang	12.659 Orang
2.	Berkurangnya konflik sosial	Penurunan jumlah konflik sosial	32 Kasus	21 Kasus
3.	Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat	Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme	5000 Orang	12.659
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik	72,50 %	-
5.	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat t (Pokmas)	20 Kelompok Masyarakat	20
6.	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Jumlah Ormas yang terbina	20%	27,92%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan

Tabel 3.2 Perwujudan masyarakat yang tertib

Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi Capaian (Orang)
Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan	5.000	12.659

Jumlah orang yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan pada tahun 2017 sebanyak 12.659 orang. Terdapat kelebihan sebanyak 7.659 orang atau 253, 18% dari target 5.000 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2016, capaian indikator sebanyak 11.545 orang atau lebih besar 230,90% dari target 5.000 orang. Prosentase pencapaian target pada tahun 2017 sebesar 253,18% lebih besar dari prosentase capaian tahun 2016 sebesar 230,90%.

Dalam Renstra Bakesbangpoldagri NTB 2013-2018 ditetapkan target sebanyak 5.000 orang tiap tahunnya dengan kondisi awal sebanyak 3.000 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2014, realisasi dicapai sebesar 135,90% atau 6.795 orang dari target 5.000 orang, kemudian tahun 2015 sebesar 175,50% atau 8.775 orang. Jika diakumulasi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 maka jumlah orang yang telah mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan telah mencapai 39.774 orang atau lebih besar dari target 20.000 orang. Dengan demikian, maka target 25.000 orang pada tahun 2018 telah tercapai pada tahun 2017.

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target dari indikator ini adalah sbb:

- Adanya dukugan mitra kerja Bakesbangpoldagri NTB yaitu FKDM, FKUB, FPK, PPWK, dan Kesbangpoldagri Kab/Kota se NTB, serta beberapa perguruan tinggi di NTB.
- Program Pemerintah Pusat dan sosialisasi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil NTB.

- Selain itu, untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan maka Gubernur NTB telah menyurati seluruh instansi/lembaga baik di lingkup Pemerintah Provinsi NTB maupun instansi vertikal untuk memberikan slot/waktu 2 JPL Materi "*Wawasan Kebangsaan*" dan "*Sekolah Perjumpaan*" pada setiap melaksanakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan masyarakat seperti seminar, lokakarya, rakor, dsb.

Beberapa kendala dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sbb:

- Banyak banyak instansi/lembaga yang melakukan sosialisasi terkait dengan wawasan kebangsaan yang tidak berkoordinasi dengan Bakesbangpoldagri NTB.
- Metode penyampaian materi sosialisasi sebagian besar masih bersifat kognitif, sehingga belum cukup signifikan merubah sikap peserta dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila.

2. Penurunan jumlah konflik sosial

Tabel 3.3 Berkurangnya konflik sosial

Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi Capaian (Orang)
Penurunan jumlah konflik sosial	32 Kasus	21 Kasus

Jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus dengan jenis, waktu dan tempat kejadian (data terlampir). Artinya jumlah kasus konflik sosial yang terjadi lebih kecil dari yang diperkirakan (target) sebanyak 32 kasus. Hal ini merupakan kemajuan masyarakat NTB secara umum dalam menjaga kehidupan berbangsa bernegara. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2016 yaitu jumlah konflik sosial yang terjadi sebanyak 23 kasus atau lebih kecil dari yang diperkirakan yaitu 37 kasus. Secara prosentase kelebihan penurunan jumlah konflik sosial 2017 sebanyak 34,38% lebih kecil dibandingkan dengan prosentase penurunan tahun

2016 sebanyak 37,84%. Sedangkan pada tahun sebelumnya laju penurunan konflik sosial dari tahun 2013 ke tahun 2014, dan 2015 secara berturut-turut yaitu 12,24%, (2014), dan 22,50% (2015). Dilihat dari prosentase laju penurunan konflik sosial sebelum tahun 2017 secara simultan meningkat, sementara pada tahun 2017 sedikit menurun. Hal ini tidak berarti bahwa upaya-upaya penanganan potensi konflik sosial di tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya, karena tahun 2017 juga terjadi penurunan konflik sosial yang cukup signifikan. Bahkan, perkiraan konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebanyak 27 kasus target **RPJMD Provinsi NTB 2013-2018** dan **Renstra Bakesbangpoldagri NTB 2013-2018** sudah dapat dicapai bahkan telah dilampaui pada tahun 2016 dan 2017. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini di tahun 2018, terlebih pada tahun ini adalah tahun politik yaitu penyelenggaraan Pemilu pada Serentak di 3 wilayah kab/kota yaitu Kota Bima, Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Timur dan pemilu gubernur NTB.

Beberapa hal menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja penurunan konflik sosial di Nusa Tenggara Barat sbb:

- Makin meningkatnya kesigapan dan kerjasama antara Pimpinan Daerah baik di tingkat provinsi (Forkopimda NTB) maupun pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota (Forkopimda Kab/Kota se NTB) dalam mengatasi berbagai isu konflik sosial.
- Makin meningkatnya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat Provinsi NTB dalam menyikapi setiap isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti sikap masyarakat terhadap kasus penghinaan warga keturunan terhadap Gubernur NTB di Bandara Singapura.

Meskipun dari sisi dukungan anggaran terhadap seluruh kegiatan sebagai upaya pencapaian indikator penurunan konflik sosial belum memadai,

namun dengan kreatifitas dalam memanfaatkan segala momentum yang ada maka segala permasalahan terkait dengan anggaran dapat diatasi dengan baik. Misalnya program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dipadukan atau disinergikan dengan program pengembangan wawasan kebangsaan dan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, serta program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme

Tabel 3.4 Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat

Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi Capaian (Orang)
Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme	5.000	12.659

Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi NTB adalah maraknya penyebaran paham-paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Bakesbangpoldagri NTB menjadikan salah satu indikator kinerja yaitu masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme sebagai upaya meminimalisir paham radikalisme ini. Adapun pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 sebanyak 12.659 orang atau lebih besar dari target sebanyak 5.000 orang. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah terminimalisirnya paham radikal masyarakat beriringan dengan sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang tertib. Dengan demikian, maka pencapaian indikator kinerja tahun sebelumnya yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sama dengan pencapaian indikator kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan.

Dasar penetapan target indikator kinerja dalam Renstra Bakesbanpoldagri NTB 2013-2018 sebanyak 5.000 orang setiap tahunnya belumlah proporsional dibandingkan dengan jumlah masyarakat NTB yang

seharusnya menjadi sasaran kegiatan ini. Namun karena keterbatasan anggaran maka penetapan target indikator kinerja mengambil pola minimal yaitu 2% dari jumlah penduduk dengan usia 15 tahun keatas.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat dalam Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi NTB. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan adalah dua program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

Tabel 3.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Capaian (%)
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam politik	72,50	-

Pengukuran indikator kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dapat dilakukan bila terdapat penyelenggaraan pemilu (Pileg, Pilpres, Pilgub, dan pilbup/walikota) pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, capaian indikator ini di tahun 2017 tidak dapat diukur karena tidak ada penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Meskipun demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Provinsi NTB** dan **Renstra Bakesbangpoldagri Provinsi NTB 2013-2018** sebesar 72,50% pada tahun 2017 merupakan angka yang rasional sebagai estimasi (*trial and error*) untuk mencapai target tahun 2018 sebesar 73%. Untuk mendukung estimasi ini berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yang terangkum dalam program pendidikan politik masyarakat. Berdasarkan DPA Bakesbangpoldagri NTB Tahun 2017, jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik sebanyak 650 orang atau kurang lebih 0,2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan target Nasional untuk partisipasi masyarakat politik pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 77,5% maka target Provinsi NTB sebesar 73% masih lebih rendah dari pada target nasional. Terdapat dua persoalan mendasar yang diperkirakan sebagai penghambat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik di Provinsi NTB yaitu tingkat pendidikan formal masih rendah, dan masih tingginya angka kemiskinan. Optimalisasi sumber daya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yaitu dengan meningkatkan peran ormas atau LSM yang menjadi binaan Bakesbangpoldagri NTB.

5. Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat

Tabel 3.6 Tercegahnya semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan Narkotika

Indikator Kinerja	Target (pokmas)	Realisasi Capaian (pokmas)
Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat	20	20

Penyakit masyarakat seperti miras, judi, narkoba, perkelahian antar pelajar, seks diluar nikah, dan kriminilitas masih menghantui kehidupan sosial masyarakat Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Apabila hal ini tidak dapat diatasi secara maksimal maka cukup potensial menimbulkan konflik dan sumber ketidaktentraman masyarakat.

Dengan demikian, "masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat" menjadi salah satu indikator kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB. Pada hakekatnya seluruh masyarakat khususnya kaum muda NTB seyogyanya mendapatkan pencerahan terhadap penyakit masyarakat ini, namun karena berbagai keterbatasan dan hambatan maka target dalam Review Renstra Bakesbangpoldagri NTB tahun 2013-2018 hanya sebesar 20 kelompok masyarakat (pokmas) pertahun.

Adapun capaian pada tahun 2017 sebesar 20 pokmas atau 100% dari target 20 pokmas. Adapun pokmas terdiri dari komunitas pemuda

(kelompok umur 15 s/d 29 tahun) mulai dari kelompok pelajar SMP/SMA/ sederajat sampai Perguruan Tinggi. Selain itu, juga terdapat kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok nelayan, petani, ojek, remaja masjid dsb. Dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 sebanyak 18 pokmas atau 90% dari target 20 pokmas, di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan. Kemampuan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target tahun 2017 tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi vertikal seperti BNN dan Polri dan berbagai elemen masyarakat seperti Toga, Toma, Todat, Pemuda.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya koordinasi yang intensif dan sinergitas dengan program dan kegiatan pemerintah kab/kota terkait dengan sosialisasi penyakit masyarakat.

6. Jumlah Ormas yang terbina

Tabel 3.7 Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif

Indikator Kinerja	Target (pokmas)	Realisasi Capaian (pokmas)
Jumlah Ormas yang terbina	20%	27,92%

Jumlah organisasi masyarakat yang terbina adalah jumlah ormas yang difasilitasi mendapatkan bantuan pembinaan dibagi dengan jumlah ormas yang terdaftar di Bakesbangpoldagri NTB.

Berdasarkan hasil fasilitasi selama tahun 2017, kinerja pencapaian indikator ini mencapai 27,92% atau 62 ormas dari 222 ormas yang terdaftar. Pencapaian ini melebihi target indikator kinerja tahun 2017 sebesar 20%. Hal ini menandakan bahwa pembinaan ormas semakin baik artinya bahwa makin banyak ormas yang telah memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak ormas didirikan tidak memiliki arah yang jelas sehingga dalam perkembangannya tidak mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang independen atau mandiri. Berdasarkan capaian indikator

kinerja ini tahun 2015 sebesar 22,59% atau 40 ormas dari 177 ormas yang terdaftar dan Tahun 2016 terdapat peningkatan yaitu 27,64% atau 55 ormas dari 199 ormas yang terdaftar menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahunnya. Adapun capaian kinerja pada tahun 2014 tidak terukur pada Bakesbangpoldagri NTB karena anggaran dan verifikasi bantuan ormas masih melekat pada BPKAD Provinsi NTB.

Terdapat kendala dalam pembinaan ormas untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTB yaitu keterbatasan anggaran dan ormas tidak memenuhi syarat administrasi setelah diverifikasi.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mewujudkan capaian indikator kinerja tahun 2017 diatas sebesar Rp 10.364.764.400 dengan realisasi 98,19% atau Rp. 10.177.328.025. Adapun rincian realisasi anggaran untuk pencapaian masing-masing indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis dalam mewujudkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan sebagai indikator kinerja dalam mewujudkan masyarakat yang tertib (sasaran strategis) didukung oleh program pengembangan wawasan kebangsaan (Rp.2.037.275.000) dan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (Rp. 500.000.000) dengan realisasi masing-masing program yaitu 95,37% dan 99,88%.
- Penurunan jumlah konflik sosial sebagai indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis berkurangnya konflik sosial didukung program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.105.794.300 dan realisasi 98,57% atau Rp. 6.018.664.731.
- Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme sebagai indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis terminimalisirnya paham radikal di masyarakat di dukung oleh program yang sama dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan.

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik sebagai indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik di dukung oleh Program Pendidikan Politik Masyarakat (Rp. 1.568.595.100) dengan realisasi sebesar 99,74% atau Rp. 1.564.570.030.
- Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat sebagai indikator kinerja mewujudkan sasaran strategis tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika didukung program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 153.100.000 dan realisasi 99,17% atau Rp. 151.829.700.
- Jumlah ormas yang terbina sebagai indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis terwujudnya organisasi masyarakat yang aspiratif di dukung oleh program yang sama untuk pencapaian indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam politik sebesar Rp. 1.568.595.100 dengan realisasi sebesar 99,74% atau Rp. 1.564.570.030.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realisasi anggaran tahun 2017 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis sebesar Rp. 10.177.328.025 atau 98,19% dari pagu anggaran Rp. 10.364.764.400.
2. Pencapaian indikator kinerja Penurunan konflik sosial tahun 2017 sebanyak 21 kasus lebih kecil dari target sebanyak 27, artinya Kinerja Bakesbangpoldagri sebesar 122%.
3. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik dengan target 2017 sebesar 72% belum dapat diukur karena belum dilaksanakan pemilu (Pilpres, Pileg, Pilkada), namun masyarakat yang didik di bidang politik telah melampaui target sebanyak 5.000 orang.
4. Realisasi "masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat" sebanyak 20 kelompok masyarakat atau 100% dari target yaitu 20 pokmas.
5. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme dapat mencapai target sebanyak 5.000 orang melalui berbagai kegiatan bekerjasama dengan para tokoh agama, masyarakat, pemuda dan perempuan.

B. Saran

1. Peningkatan peran dan pemberdayaan forum-forum yang menjadi mitra Bakesbangpoldagri sangat urgen untuk dilakukan guna deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di kalangan masyarakat.
2. Koordinasi yang intensif seluruh stakeholder dan pembinaan serta mediasi kepada warga kampung yang berkonflik agar tetap dilakukan serta didukung dengan pendanaan yang memadai.
3. Peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat supaya ditingkatkan lagi, baik volume maupun sasaran.

4. Pemantapan sosialisasi hidup berdemokrasi dan penggunaan hak pilih supaya tetap dilakukan dan lebih intensif lagi.

KEPALA BADAN KESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. Lalu Syafi'i, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198203 1 440

LAPORAN PENDUKUNG LKjIP/LAKIP 2017

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

SKPD/UNIT KER. : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

TAHUN ANGGAR : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	TARGET/ANGGARAN (Rp.)		REALISASI ANGGARAN		% CAPAIAN		FISIK %
		TH 2016	TH 2017	TH 2016	TH 2017	THD TH 2016	THD TH 2017		TH 2016	TH 2017	TH 2016	TH 2017	TH 2016	TH 2017	
1	2	3	4	5	6	7 = 5:3x100%	8 = 6:4x100%	9	10	11	12	13	14= 12:10x100%	15= 13:11x100%	16
1 Berkurangnya konflik sosial	Konflik Sosial (Kasus)	37	32	23	21	62.16%	65.63%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3,988,130,000	6,105,794,300	3,954,343,200	6,018,664,731	99.15%	98.57%	100.00
								Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1,091,220,000	-	747,608,700	-	68.51%	0.00%	100.00
								Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	981,227,294	2,037,275,000	1,184,228,243	1,942,871,435	120.69%	95.37%	100.00
								Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	500,000,000	-	499,392,129	0.00%	99.88%	100.00
								Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	57,243,604	153,100,000	59,703,604	151,829,700	104.30%	99.17%	100.00
2 Terwujudnya Suasana Politik yang Santun dan Bertanggung-jawab	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik (%)	72%	72.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,195,764,700	1,568,595,100	1,193,941,956	1,564,570,030	99.85%	99.74%	100.00

* Kasus yang dimaksud diatas adalah kasus skala provinsi sesuai UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial